

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujianti, S.Pd.,M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak. C.A.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun oleh:

Kelompok 3

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Anggi Fadhillah Putri | 2313031061 |
| 2. Ranum Sri Rahayu | 2313031074 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul **“Penganggaran Sektor Publik”** tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. Pujianti, S.Pd.,M.Pd.** selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari tugas pembuatan makalah ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2025

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Pembelajaran	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Penganggaran Sektor Publik	3
2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	3
2.3 Karakteristik Anggaran	6
2.4 Prinsip-prinsip anggaran sektor publik.....	6
2.5 Pendekatan Penyusunan Penganggaran Pada Sektor Publik	7
2.6 Pentingnya Anggaran Sektor Publik	12
BAB III PENUTUP	14
3.1 Kesimpulan.....	14
3.2 Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	16
STUDI KASUS	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran sektor publik berfungsi sebagai cetak biru keuangan yang mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah. Anggaran ini memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk periode tertentu, memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat bagaimana dana publik akan dialokasikan. Dengan demikian, anggaran menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan publik.

Aspek perencanaan memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu organisasi, aktivitas organisasi akan berjalan dengan baik jika seluruh proses perencanaan dilaksanakan dengan baik. Perencanaan strategik merupakan upaya untuk mendorong pemikiran kedepan dan mengetahui apa yang akan dituju di masa depan. Anggaran sektor publik menjadi instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung membayangkan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sektor publik diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Anggaran sektor publik juga diperlukan untuk menjadi instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian anggaran sektor publik?
2. Apakah fungsi anggaran sektor publik?
3. Apa karakteristik anggaran sektor publik?
4. Apa prinsip-prinsip anggaran sektor publik?
5. Bagaimana pendekatan penyusunan penganggaran sektor publik?
6. Apa pentingnya anggaran sektor publik?

1.3 Tujuan Pembelajaran

1. Mengetahui Pengertian anggaran sektor publik
2. Mengetahui fungsi anggaran sektor publik
3. Mengetahui karakteristik anggaran sektor publik
4. Mengetahui prinsip-prinsip anggaran sektor publik
5. Mengetahui pendekatan penyusunan penganggaran sektor publik
6. Mengetahui pentingnya anggaran sektor publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian penganggaran sektor publik

Anggaran berasal dari kata budget, sebelumnya dari kata bougette (Prancis) yang berarti “sebuah tas kecil” anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan dan dipertanggungjawabkan (Majid, 2019:38). Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dan ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai (Nurkholis, dan Khusaini, M., 2019:4). Jadi, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penganggaran adalah proses yang dapat menyusun rencana keuangan dengan tepat, yang didapat dari pendapatan dan dialokasikan kepada masing-masing kebutuhan.

Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodek (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program, kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan atau pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran (Haryanto dkk., 2007: 67-68 dalam Majid, 2019: 39). Anggaran sektor publik adalah anggaran yang disediakan oleh dana publik untuk memenuhi program-program di sektor publik. Anggaran juga menjaji penghubung sumber keuangan dengan perilaku manusia dalam mencapai tujuan keuangan. Anggran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagaimana agar terjamin secara layak.

2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik yang besar seperti pemerintah, anggran bukan hanya untuk sebuah rencana tahun tetapi menjadi akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepada pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:63) dalam Majid (2019:41) mengungkapkan fungsi utama anggaran sektor publik:

1. Alat Perencanaan (*Planing tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisai. Anggran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa

yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
 - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian.
2. Alat Pengendalian (*Control tool*)

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran atau *misappropriation* dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas.

3. Alat Politik (*political tool*)

Pada sektor publik, political tool sebagai bentuk keomitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political will*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

4. Alat Kebijakan Fiskal (*fiscal tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan guna untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

5. Alat Koordinasi dan Komonikasi (*coordination and communication tool*)

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif, anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Alat Penilaian Kerja (*performance measurement tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Alat Motivasi (*motivation tool*)

Anggaran sebagai instrumen untuk motivasi manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, agar dapat memotivasi anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable atau demanding but achievable*, maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Alat Menciptakan Ruang Publik (*public sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mempengaruhi anggaran untuk kepentingan mereka. Kelompok lain yang tidak terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

2.3 Karakteristik Anggaran

Anggaran memiliki beberapa karakteristik, menurut Haryanto, dkk (2007:68) dalam Majid, (2019:39-40) bahwa:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Jadi, karakteristik sebuah anggaran akan dinyatakan dalam satuan keuangan ataupun selain keuangan, anggaran yang disusun mencakup semua anggaran yang akan dilakukan dalam beberapa tahun, dalam anggaran dicatat berupa komitmen yang disanggupi oleh manajemen yang bisa mencapai sasaran, setelah anggaran disusun maka anggaran akan ditelaah dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi lagi tingkatan dari penyusun anggaran, dan setelah disetujui anggaran akan sulit diubah jika tidak dalam keadaan yang genting sekali.

2.4 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Haryanto dkk. (2007: 68), ada beberapa prinsip dasar anggaran sektor publik, yaitu:

1. Otorisasi oleh Legislatif: Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif: Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan Anggaran: Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).

4. *Nondiscretionary Appropriation*: Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
5. Periodik: Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitalunan.
6. Akurat: Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
7. Jelas: Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
8. Diketahui Publik: Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.5 Pendekatan Penyusunan Penganggaran Pada Sektor Publik

Ada 2 (dua) pendekatan dalam menyusun anggaran sektor publik yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan *New Public Management* (NPM). Anggaran pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem penganggaran tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu *Planning Programming and and Budgeting System* (PPBS), *Zero Based Budgeting* (ZBB), dan *Performance Budgeting*.

1. Anggaran Dengan Pendekatan Tradisional (Konvensional)

Pendekatan penyusunan anggaran tradisional mempunyai beberapa karakteristik menurut Haryanto dkk. (2007: 71-72), yaitu:

- Incrementalism
- Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item
- Cenderung sentralistis
- Bersifat spesifikasi
- Tahunan
- Menggunakan prinsip anggaran bruto.

Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan

bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah lingkup kepatuhan penggunaan anggaran.

2. Anggaran dengan Pendekatan *New Public Management*

Seiring dengan semangat reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam sistem penganggaran sektor publik. Beberapa teknik penganggaran sektor publik, yaitu: anggaran kinerja (*performance budgeting*), *Zero Based Budgeting* (ZBB), dan *Planning, Programming, and Budgeting System* (PPBS).

➤ Anggaran Kinerja (*performance budgeting*)

Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk coba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan kinerja juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pembuatan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (*overspending*). Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi, dan dikendalikan melalui *Internal cost awareness*,

audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program, Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bersasaran tanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

➤ *Zero Based Budgeting (Zbb)*

Konsep *Zero Based Budgeting* (ZBB) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep *Zero Based Budgeting* dapat menghilangkan *incrementalism* dan *line-item* karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (*zerobase*). Penyusunan anggaran yang bersifat *incrementalism* mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk atau factor lainnya. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dan hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dan struktur anggaran, akan mungkin juga muncul item baru. Proses pengimplementasi ZBB terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1) Identifikasi unit Keputusan

Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggung jawaban (*responsibility center*). Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan (*decision unit*) yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. *Zero Based Budgeting* merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Sebagai contoh, pemerintah daerah merupakan suatu unit keputusan besar yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi dinas-dinas; dinas-dinas dipecah lagi menjadi subdinas-subdinas; subdinas dipecah lagi menjadi subprogram, dan sebagainya. Dengan demikian, suatu pemerintah daerah bisa memiliki ribuan unit keputusan. Setelah dilakukan identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen tersebut disebut paket-paket keputusan (*decision packages*).

2) Penentuan Paket Keputusan

Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu: a. Paket keputusan *mutually-exclusive* Paket keputusan yang bersifat *mutually-exclusive* adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah

satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain. b. Paket keputusan *incremental*, Paket keputusan *incremental* merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan paket lain yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga akan berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas.

3) Mengurutkan dan mengevaluasi paket Keputusan

Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah mengurutkan semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali.

➤ *Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)*

PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan rerangka untuk membuat pilihan tersebut. PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi struktur program dan melakukan analisis program. Struktur program merupakan rerangka untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki

dengan aktivitas yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur program merupakan semacam kerangka bangunan dan desain sistem PPBS. Analisis program terkait dengan kegiatan mengenai biaya dan manfaat dari masingmasing program sehingga dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih agar dapat memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan. Teknik penganggaran PPBS memfokuskan pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan. PPBS dapat menghilangkan duplikasi atau overlapping program dalam pencapaian tujuan organisasi. PPBS secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan. PPBS mempertimbangkan semua biaya yang terjadi.

2.6 Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Perhatian perencanaan dalam anggaran sektor publik ini dibuat khususnya untuk membantu menentukan tingkat prioritas kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, failitas-fasilitas umum seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya sehingga dapat memenuhi kehidupan atas hajat hidup orang banyak agar terjamin secara layak. Untuk itulah dalam tingkat kesejahteraan suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh berbagai keputusan yang diambil oleh kekuasaan pemerintah melalui anggaran yang selalu dibuat sesuai dengan agenda pemerintahan. Umumnya dalam sebuah pemerintahan negara demokrasi, pemerintah berkedudukan diamanahi dalam memenuhi kepentingan rakyat. Pemerintah yang diberikan kewenangan dalam membuat regulasi anggaran publik pengatur atau mengelola uang rakyat tersebut sefektif mungkin. Pemerintah mengatur belanja publik dengan system perencanaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2005:53), didalam anggaran sektor publik memiliki peranan penting dengan beberapa alasan, diantaranya :

- Anggaran adalah alat bagi lembaga pemerintah untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan berbagai pembangunan bidang sosial ekonomi, kemudian untuk menjamin kesinambungan serta dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu negara.
- Anggaran sangat dibutuhkan atau diperlukan mengintai berbagai kebutuhan serta berbagai keinginan suatu masyarakat negara yang tidak terbatas serta selalu terus berkembang, disisi lain sumber daya yang ada sangat terbatas. Secara nyata bahwa anggaran sangat diperlukan mengingat adanya permasalahan tentang keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*) kemudian berbagai pilihan (*choice*), serta *trade off*.
- Anggaran sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan dalam rangka menyakinkan keberadaan instansi pemerintah yang harus bertanggungjawab kepada publik atau rakyatnya. Anggaran publik ini sebagai instrument dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Anggaran sektor publik adalah anggaran yang disediakan oleh dana publik untuk memenuhi program-program di sektor publik. Anggaran juga menjadi penghubung sumber keuangan dengan perilaku manusia dalam mencapai tujuan keuangan. Anggaran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu: alat perencanaan, alat pengendalian, alat politik, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. karakteristik sebuah anggaran akan dinyatakan dalam satuan keuangan ataupun selain keuangan, anggaran yang disusun mencakup semua anggaran yang akan dilakukan dalam beberapa tahun, dalam anggaran dicatat berupa komitmen yang disanggupi oleh manajemen yang bisa mencapai sasaran, setelah anggaran disusun maka anggaran akan ditelaah dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi lagi tingkatan dari penyusun anggaran, dan setelah disetujui anggaran akan sulit diubah jika tidak dalam keadaan yang genting sekali.

Ada 2 (dua) pendekatan dalam menyusun anggaran sektor publik yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management (NPM). Anggaran sektor publik juga memiliki beberapa prinsip yaitu Otorisasi oleh Legislatif, Komprehensif, Keutuhan Anggaran, *Nondiscretionary Appropriation*, Periodik, Akurat, Jelas, dan Diketahui Publik. Pentingnya penganggaran sektor publik adalah dalam tingkat kesejahteraan masyarakat banyak dipengaruhi oleh berbagai keputusan yang diambil oleh kekuasaan pemerintah melalui anggaran yang selalu dibuat sesuai dengan agenda pemerintahan.

3.2 Saran

Makalah ini merupakan *resume* dari beberapa sumber buku. Untuk lebih mendalami isi makalah dapat dibaca dalam *website*, jurnal, maupun buku

rujukan yang tercantum di daftar Pustaka. Selanjutnya, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun kekeliruan dalam penyusunan makalah ini. Untuk itu, saran dan kritikan dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Sehingga makalah ini bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. CV. Berkah Utami. Sulawesi Selatan.

Mustanir, A., Hendrayady, A., dkk. (2023). Teori Administrasi Publik. PT Global Eksekutif Teknologi. Padang.

Nurkholis, dan Khusaini, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik. UB Press. Malang.

STUDI KASUS

Kota Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, memiliki peran penting dalam perekonomian dan pelayanan publik di wilayah Jawa Timur. Dengan populasi lebih dari 3 juta jiwa, Surabaya menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran sektor publik selama pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Surabaya harus mengalokasikan dana yang cukup untuk sektor kesehatan guna menangani lonjakan kasus, sekaligus tetap memperhatikan sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur yang juga penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam laporan APBD Kota Surabaya tahun 2020, terlihat bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan meningkat signifikan, yaitu sebesar 40% dari Rp 500 miliar menjadi Rp 700 miliar. Peningkatan ini digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), fasilitas isolasi, dan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, sebagaimana tercatat dalam data Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Namun, peningkatan anggaran kesehatan ini berdampak pada pemotongan anggaran di sektor lain. Misalnya, Dinas Pendidikan melaporkan adanya pengurangan anggaran sebesar 15%, yang menyebabkan penundaan renovasi sekolah dan program pembelajaran jarak jauh yang sangat dibutuhkan selama masa pandemi. Selain itu, sektor infrastruktur juga mengalami pengurangan dana, yang berpotensi menghambat pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik. Kritik dari media lokal menyoroti ketidakseimbangan alokasi anggaran ini, yang dianggap kurang memperhatikan kebutuhan sektor pendidikan dan infrastruktur, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang bagi pembangunan kota.

Pertanyaan:

1. Apakah alokasi anggaran yang dilakukan sudah mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik? Jelaskan alasannya.
2. Bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran di sektor publik?